

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2014-2019.

6.1 Strategi Umum

Sebagai upaya mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, melalui lima misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan



untuk semua, tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut *pro-poor growth* (Dollar and Kraay, 2000), yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, di mana *wong cilik* atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

6.1.1 Pembangunan Berkelanjutan Berpusat pada Rakyat yang Inklusif, dan Mengedepankan Partisipasi Rakyat

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah (*affirmative*) kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

Pembangunan inklusif yang berpusat pada rakyat mengedepankan pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.



Kemampuan elemen masyarakat yang tertinggal ditingkatkan melalui pengembangan dan dinamisasi potensi yang mereka miliki, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Kemampuan penduduk miskin atau mereka yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka (*nguwongke-wong*), serta terpeliharanya tatanan nilai budaya lokal.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung, dan berdaya saing.

Strategi *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* tersebut lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini merupakan strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya demokrasi inklusif (*inclusive democracy*), pertumbuhan ekonomi yang memadai (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender, dan *intergenerational equity*.

Pengembangan demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memiliki korelasi dengan upaya membebaskan *wong cilik* dari kemiskinan. Dengan pemahaman seperti ini, mengutip pemikiran Amartya Sen, penerima penghargaan Hadiah Nobel bidang Ilmu Ekonomi pada 1998, ide demokrasi secara esensial sangat berkaitan dengan praktik penalaran publik (*public reasoning*).

Penalaran publik dapat diartikan sebagai “alasan seluruh warganegara di dalam masyarakat yang majemuk”, yang dapat memfasilitasi perbedaan pendapat



dalam berbagai masalah dengan alasan yang dapat diterima oleh bermacam orang dan/atau berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Penalaran publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan yang senantiasa membuka diskusi publik, yang berlangsung sebagai perluasan kebebasan sipil, kebebasan politik, dan partisipasi, ditunjang oleh berfungsinya perangkat *rule of law* yang menyangga seluruh instrumen pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi yang berkembang dalam ruang sipil dan politik harus menghasilkan perbaikan substansial untuk reformasi hukum, pemerintahan, dan representasi politik. Pemerintahan demokratis harus memiliki kemampuan membongkar berbagai kendala struktural dalam mentransformasikan demokrasi sebagai penalaran publik demi pemajuan hak sosial dan ekonomi rakyat. Tanpa kemampuan itu, demokratisasi substansial yang diidealkan akan mengalami kebangkrutan, yang antara lain, ditandai merebaknya fenomena marginalisasi, dan makin melemahnya kapasitas, serta kapabilitas masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat berdemokrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, dan memajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang berpihak kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan lembaga-lembaga berbasis komunitas lokal, meminjam konsep pemikiran Jurgen Habermas, sebagai “ruang publik deliberatif”, yang sekaligus merupakan sebuah inovasi sosio-kultural yang berbasis pada ruang komunitas lokal untuk memprakarsai perubahan kontekstual.

Melalui “ruang publik deliberatif”, yang dalam bahasa lebih sederhana disebut “musyawarah warga” atau “rembug warga”, dapat dibangun upaya mengaktifkan para individu sebagai warganegara untuk berkomunikasi dan berdialog dalam sebuah ruang publik, yang hasilnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Ruang publik merupakan tempat di mana penalaran publik diuji dan dikontestasikan. Dari sini bisa dibangun titik awal untuk membangun proses penalaran sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan.



Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga. “Rembug warga” atau “ruang publik deliberatif” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji masalah yang dijumpai di daerahnya melalui penalaran publik, sekaligus menjadi penyambung keterputusan hubungan atau diskoneksi antara institusi formal demokrasi dan para konstituen yang diwakilinya.

Inti dari demokrasi deliberatif adalah partisipasi warga secara langsung, dan tidak mengenal keterwakilan (*representation*), maupun istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar-pihak. Demokrasi deliberatif, atau demokrasi musyawarah, lebih menonjolkan argumentasi, dialog saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Proses demokrasi deliberatif mendorong kompetensi komunikatif warga, yang memungkinkan setiap individu, tanpa kecuali, termasuk kaum marginal, menyuarakan kebutuhannya.

“Rembug warga” merupakan pengejawantahan demokrasi deliberatif di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan dialog antar-warga yang mengedepankan penalaran publik. Pranata “rembug warga” merupakan pengorganisasian swadaya di tingkat komunitas yang menumbuhkan proses penyadaran kolektif, karena peserta “rembug warga” adalah warga aktif yang hadir bukan semata memenuhi undangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri.

Membangun “ruang publik deliberatif” merupakan sebuah upaya menemukan “jalan lain” untuk menjembatani demokrasi elitis dan demokrasi partisipatoris, sekaligus sebagai “jalan tengah” atau “struktur tengah” antara sistem politik dan sektor privat. “Ruang publik deliberatif” bisa berfungsi sebagai mata rantai untuk menghubungkan secara horisontal prakarsa masyarakat miskin melalui partisipasi publik langsung. Ini merupakan bentuk demokrasi partisipatoris-deliberatif sebagai alternatif terhadap demokrasi representatif, di mana potensi rakyat miskin bisa diberdayakan melalui “ruang publik deliberatif”.



Ide mengenai demokrasi memiliki korelasi dengan upaya membebaskan rakyat dari kemiskinan, dan mensejahterakan rakyat. Komunikasi, dialog, interaksi publik, dan partisipasi politik merupakan kata kunci dalam praktik demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai proses penalaran publik yang terbuka, maka pemerintah harus membuka ruang untuk mendengar suara-suara yang berbeda dalam mengupayakan solusi bagi masalah yang dihadapi rakyat secara terbuka, termasuk mendengarkan yang tak terdengar (*hearing the unheard*). Pemerintah tidak boleh menutup katup atau saluran bagi suara-suara yang berbeda, termasuk juga suara-suara yang tak terungkapkan. Dengan kata lain, kita harus membangun sistem yang menjamin kebebasan rakyat untuk berbicara dan berpendapat yang memiliki korelasi dengan kebebasan dari kemiskinan.

Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekadar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri, dan kebebasan yang dapat mereka nikmati, sebagai sesuatu yang esensial dari ide mengenai pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang dapat makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.

Demokrasi juga harus ditekankan pada makna keadilan sosial, terutama konsep keadilan pada gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan imbalan bagi tindakan yang memberikan sumbangan untuk keuntungan bersama. Prinsip kebebasan harus mengacu pada kebebasan yang setara, di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan.

Paradigma keadilan memiliki dua prinsip, yang pertama, bahwa setiap orang harus memperoleh hak atas kebebasan dasar yang paling luas, dan sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang yang lain. Prinsip ini dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dasar, yakni kebebasan berpikir, berkehendak, berpendapat, berkumpul,



memilih, kebebasan untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk memiliki jabatan publik, dan kepemilikan pribadi. Kedua adalah prinsip perbedaan, yang memperbolehkan terjadinya ketidaksetaraan secara sosial dan ekonomi hanya jika memaksimalkan keuntungan bagi rakyat yang paling tidak diuntungkan, dan kesetaraan yang adil dalam memperoleh kesempatan bagi semua. Kesetaraan ini tidak hanya berarti kesetaraan dalam kesempatan kerja, tetapi juga kesempatan hidup. Kalau pun kita harus menerima ketidaksetaraan, seperti perbedaan perolehan keuntungan dalam strata ekonomi, di mana prinsip imbalan menjadi acuan, maka harus melalui cara yang adil, sehingga dalam konteks ini, prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya.

6.1.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin (*Pro-Poor Growth*)

Strategi pemberdayaan rakyat melepaskan diri dari perangkap *trade off* pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi haruslah yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan serempak dengan pemerataan merupakan pertumbuhan yang ramah bagi penduduk miskin, disebut *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan kapabilitas penduduk miskin untuk lebih berpartisipasi, dan memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi (Kimenyi, 2006). Sebuah pertumbuhan ekonomi belum cukup dikategorikan sebagai *pro-poor growth* jika hanya menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan mengabaikan ketimpangan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi disebut *pro-poor growth* jika proporsi peningkatan rata-rata



pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin (Kakwani and Pernia, 2000).

Strategi *pro-poor growth* secara konseptual memiliki definisi berbeda dengan strategi *pro-poor* dan *pro-growth* yang masing-masing berdiri terpisah, meski di dalam strategi *pro-poor growth* secara implisit juga mengandung unsur *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Namun ketika keempat unsur tersebut tergabung di bawah konsep strategi *pro-poor growth*, maka melahirkan definisi baru yang berbeda dengan definisi masing-masing unsurnya. Strategi *pro-poor growth* juga bukan sekadar hasil penjumlahan dari keempat unsur tersebut.

Meski demikian, upaya mencapai *pro-poor growth*, tidak dapat dilepaskan dari kandungan unsur strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, yang masing-masing memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*).

Melalui strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan mampu berjalan serempak, sehingga pertumbuhan ekonomi melibatkan, menyentuh, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, termasuk penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama disertai penurunan jumlah penduduk miskin, dan juga penurunan ketimpangan pendapatan.

6.1.3 Pengarusutamaan Gender (Pro-Gender)

Strategi umum pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.



Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

Artikulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Jawa Timur sebagai strategi umum bertujuan untuk menegaskan sebuah prinsip dasar bahwa laki-laki dan perempuan adalah “setara” tetapi secara fitrah tetap “tidak sama”. Penguatan nilai ini dalam strategi pembangunan Jawa Timur secara afirmatif akan membuka ruang lebih luas bagi peran laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan secara adil. Hadirnya kekuatan harmonis antara laki-laki dan perempuan yang tumbuh dan berkembang secara setara ini akan menjadi kekuatan pembangunan yang potensial bagi percepatan kesejahteraan di Jawa Timur.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama penetapan dan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 6.1.

6.3 Penyelarasan Strategi RPJMN

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN dan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI dengan Nomor



050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Pendekatan strategi pembangunan nasional yang menggariskan 3 (tiga) dimensi pembangunan yang meliputi dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Penyelarasan strategi pembangunan nasional ke dalam RPJMD provinsi Jawa Timur, dengan menempatkan 3 (tiga) dimensi pendekatan pembangunan dalam RPJMN sebagai tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.

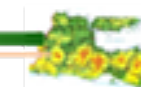
Tiga dimensi pendekatan pembangunan tersebut, akan menentukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah provinsi Jawa Timur. Yaitu berupa serangkaian kebijakan dan program yang berperspektif pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rinciandetil mengenai penyelarasan antara Strategi Nasional dengan Strategi yang digunakan dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana terlampir pada Tabel 6.2





Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan	Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, program AYO KERJA (bursa kerja online) , job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	√	√	√	√	√
				Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa Migran Produktif	√	√	√	√	√
				Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus.					
				Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja	√	√	√	√	√
				Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa	√	√	√	√	√
		2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru	√	√	√	√	√
				Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan	Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	√	√	√	√	√



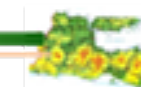


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
			tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.	Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus	√	√	√	√	√
				Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah	√	√	√	√	√
				Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.	√	√	√	√	√
				Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
		4. Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	√	√	√	√	√
		5. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan	Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	√	√	√	√	√
				Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	√	√	√	√	√
				Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi	√	√	√	√	√
				Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta	√	√	√	√	√
		6. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos	√	√	√	√	√



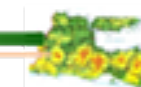


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).					
		7. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	√	√	√	√	√
		8. Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak	√	√	√	√	√
				Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	√	√	√	√	√
		9.Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				kepemudaan					
			Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS	√	√	√	√	√
			Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan prestasi olahraga	√	√	√	√	√
		10. Menurunnya presentase penduduk miskin	Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.	Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di organisasi pemerintah daerah (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	√	√	√	√	√
				Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin	√	√	√	√	√
				Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan	√	√	√	√	√



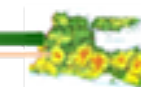


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin					
				Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah	√	√	√	√	√
				Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah	√	√	√	√	√
				Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan	√	√	√	√	√
				Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah	√	√	√	√	√
				Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin	√	√	√	√	√
				Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan	√	√	√	√	√



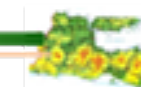


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				usaha ekonomi mikro dan kecil					
				Peningkatan kapasitas lembaga - lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah	√	√	√	√	√
				Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
		11. Meningkatkan nya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
		12. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangu-nan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	√	√	√	√	√
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindutri, dan industrialisasi	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan penanganan ketahanan pangan	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal	√	√	√	√	√
				Pengembangan pengawasan keamanan pangan	√	√	√	√	√
				Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan	√	√	√	√	√
				Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan	√	√	√	√	√
				Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem infomasi pasar (pasokan, harga dan akses)	√	√	√	√	√
		Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan	Perluasan jaringan akses permodalan UKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha	√	√	√	√	√
				Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UKM melalui pemanfaatan idle money	√	√	√	√	√
				Peningkatan perluasan jaringan Bank UKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UKM	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	√	√	√	√	√
				Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi	√	√	√	√	√
				Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional	√	√	√	√	√
				Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan	√	√	√	√	√



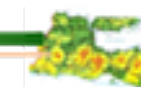


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				infrastruktur yang makin memadai					
				Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil	√	√	√	√	√
				Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.	√	√	√	√	√
				Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan	√	√	√	√	√
				Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				usaha ekonomi perempuan					
				Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan	√	√	√	√	√
				Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)	√	√	√	√	√
				Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	√	√	√	√	√



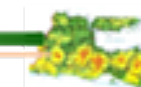


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan	√	√	√	√	√
				Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan	√	√	√	√	√
				Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang	√	√	√	√	√
				Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional	√	√	√	√	√
				Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur	√	√	√	√	√
				Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UKM di pasar domestik maupun internasional	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan performa standarisasi Industri	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro	√	√	√	√	√
				Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	√	√	√	√	√



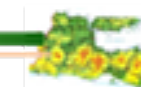


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata	√	√	√	√	√
				Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing	√	√	√	√	√
				Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi kemitraan UKM dan koperasi lokal dengan	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				usaha pariwisata berskala besar					
				Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional	√	√	√	√	√
				Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	√	√	√	√	√
				Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA	√	√	√	√	√
				Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan	√	√	√	√	√



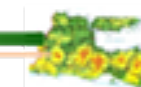


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	√	√	√	√	√
				Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional	√	√	√	√	√
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi	√	√	√	√	√
				Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi	√	√	√	√	√
				Peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi	√	√	√	√	√
				Pemenuhan sarana prasarana perhubungan dan peran serta masyarakat dan swasta	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, mela-lui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penye-diaan lahan dan penang-gulangan masalah sosial.	√	√	√	√	√
				Perbaiki sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air.	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional & pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya.	√	√	√	√	√
				Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.	√	√	√	√	√
				Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan	√	√	√	√	√



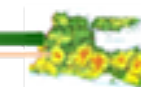


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)					
				Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif	√	√	√	√	√
				Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	√	√	√	√	√
				Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas	√	√	√	√	√
				Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah	√	√	√	√	√
				Peningkatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan aneka energi baru terbarukan	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta kelestarian Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan	Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.	√	√	√	√	√
				Peningkatan kualitas air & kualitas udara	√	√	√	√	√
				Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.	√	√	√	√	√
				Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3)	√	√	√	√	√
		Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan	Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman	Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√



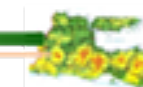


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
		Penataan Ruang	dalam pemanfaatan ruang provinsi	untuk dievaluasi oleh Gubernur					
				Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
				Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	√	√	√	√	√
Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini	√	√	√	√	√
		Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Meningkatkan kualitas pengamanan informasi secara tepat dan akurat	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengamanan informasi	√	√	√	√	√
		Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan kualitas data dan informasi	Peningkatan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
		Meningkatnya masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas OPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD	√	√	√	√	√
		Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	√	√	√	√	√
				Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	√	√	√	√	√
				Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	√	√	√	√	√
				Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua	√	√	√	√	√



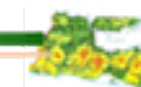


Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				tingkat pelayanan publik					
		Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	√	√	√	√	√
		Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsif, transparan dan akuntabel.	√	√	√	√	√
				Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	√	√	√	√	√
				Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana	√	√	√	√	√
		Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	√	√	√	√	√
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial	Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial.	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan edukasi politik terhadap masyarakat	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	√	√	√	√	√
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>					
		2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya	√	√	√	√	√





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Pernyataan	2015	2016	2017	2018	2019
				per-masalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme					
				Optimalisasi pencegahan terhadap pelanggaran Perda melalui peningkatan pengetahuan masyarakat serta penguatan aparatur penegakan perda					





Tabel 6.2 Norma Pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas
Dimensi Pembangunan Manusia		
Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Indeks Pendidikan	Pendidikan
	Indeks Minat Baca	Pendidikan
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi min S1/D4	Pendidikan
Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kesehatan
	Persentase stunting/pendek	Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Kesehatan
	Persentase RFT Rate Kusta	Kesehatan
	Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	Kesehatan
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	Kesehatan
Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman
Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Mental/Karakter
	Jumlah atlet yang berprestasi	Mental/Karakter
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan		
Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kedaulatan Pangan
	Ketersediaan pangan - Beras - Jagung - Kedelai	Kedaulatan Pangan
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan sub kategori Tanaman Pangan terhadap PDRB	Kedaulatan Pangan
	Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	Kedaulatan Pangan
	Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PDRB	Kedaulatan Pangan
	Persentase sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	Kehutanan
	Persentase Pertumbuhan sub kategori Perikanan terhadap PDRB	Kelautan dan Perikanan





Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas
	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata
	Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan	Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai Ijin Prinsip Investasi (PMA dan PMDN)	Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Rasio Elektrifikasi	Kedaulatan Energi
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Konektivitas
	Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	Konektivitas
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Lingkungan
	Indeks Kualitas Udara	Lingkungan
	Indeks Tutupan Lahan	Lingkungan
	Indeks Tutupan Hutan	Lingkungan/Kehutanan
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan		
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Antar Pendapatan
Menurunnya presentase penduduk miskin	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	Antar Pendapatan
	Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Antar Pendapatan
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Antar Pendapatan
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Antar Pendapatan
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase peningkatan pendapatan pekerja di Jawa Timur	Antar Pendapatan
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Antar Pendapatan
	Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur	Antar Pendapatan
	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Antar Pendapatan
	Cakupan KB Aktif/CPR	Antar Pendapatan





Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas
Menurunnya presentase penduduk miskin	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	Antar Wilayah
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Antar Wilayah
	Persentase pelayanan air untuk Irigrasi	Antar Wilayah
Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	Antar Wilayah
KONDISI PERLU		
Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yang diselesaikan	Kepastian Dan Penegakan Hukum
	Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	Kepastian Dan Penegakan Hukum
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	Kepastian Dan Penegakan Hukum
Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Politik dan Demokrasi
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial.	Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur	Politik dan Demokrasi
	Indeks Demokrasi Indonesia	Politik dan Demokrasi
Meningkatnya pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Persentasi informasi persandian yang diamankan	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi





Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas
	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Nilai opini BPK	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Nilai SAKIP	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Peringkat LPPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase Pelayanan Keprotokolan	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase penduduk ber KTP	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Penanggulangan Bencana





DAFTAR ISI

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	318
6.1 Strategi Umum	318
6.1.1 Pembangunan Berkelanjutan Berpusat pada Rakyat yang Inklusif, dan Mengedepankan Partisipasi Rakyat ..	319
6.1.2 Pertumbuhan Eekonomi yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin (<i>Pro-Poor Growth</i>).....	324
6.1.3 Pengarusutamaan Gender (Pro-Gender)	325
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan	326
6.3 Penyelarasan Strategi RPJMN	326
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii



DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	328
Tabel 6.2 Norma Pembangunan	356

